

# SKRIPSI

YUSTICINIANUS RADJAH

## PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001

# **PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Sri Handajani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130809069**

**Penyusun,**

**Yusticinianus Radjah**  
**NIM. 039614416**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**BAB IV****PENUTUP****1. Kesimpulan**

- a. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen bersifat final. Meskipun dalam penyelesaian sengketa konsumen masih di bukannya kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ataupun kasasi. Hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat final dari putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Penjelasan pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan yang dimaksud final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding maupun kasasi. Hal tersebut berarti bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak terdapat lembaga banding maupun lembaga kasasi. Mengenai sifat mengikat dari putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen tidaklah serta merta timbul. Sebab putusan tersebut baru merupakan putusan yang sifatnya mengikat jika para pihak menyatakan menerima atau para pihak tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

semua putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dapat dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan.

- b. Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan putusan majelis badan penyelesaian sengketa konsumen secara sukarela maka terhadap hal tersebut dapat dimintakan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri (dalam hal ini kepada Ketua Pengadilan Negeri) tempat konsumen dirugikan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka hak konsumen untuk mengajukan suatu penetapan eksekusi beralih menjadi wewenang majelis badan penyelesaian sengketa konsumen. Untuk ketentuan dan tata cara pelaksanaan eksekusi tetapa mengacuh pada HIR selam tidak ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

## **2. Saran**

- a. Segera dibentuk badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai suatu badan alternatif yang dapat dipilih oleh baik konsumen ataupun pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen dibidang keperdataan. Sebab dengan dibentuknya suatu lembaga yang khusus memeriksa dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akan mengurangi

beban perkara di pengadilan. Dan diharapkan dengan terbentuknya badan tersebut akan semakin memberikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun hendaknya pembentukan tersebut disertai dengan pemebentukan pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan penyelesaian sengketa konsumen.

- b. Bagi para pelaku usaha yang telah menerima putusan majelis penyelesaian sengketa konsumen diharapkan dapat melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga pelaku usaha tidak akan berhadapan dengan kekuatan hukum yang bersifat memaksa sebab hal ini akan membawa kerugian bagi pelaku usaha sendiri. Dengan tidak melaksanakan putusan pelaku usaha selain membayar ganti rugi terhadap konsumen juga harus menanggung biaya eksekusi. Disamping bukan tidak mungkin pelaku usaha juga akan berhadapan instrumen pidana sebab ketentuan Pasal 56 ayat (4) secara tegas mengatur bahwa putusan majelis yang tidak dilaksanakan maka akan diserahkan pada penyidik untuk melakukan penyidikan.

